

Judul : Industri Butuh Kebijakannya Top: Tertinggal dari Vietnam
Tanggal : Minggu, 24 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tertinggal Dari Vietnam

Industri Butuh Kebijakan Top

WAKIL Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mendorong adanya terobosan agar industri nasional lebih kompetitif. Pasalnya, pertumbuhan industri Indonesia tertinggal dibanding dengan Vietnam.

Chusnunia menegaskan, perlu kebijakan terobosan untuk menyelesaikan persoalan industri agar Indonesia tidak terus tertinggal dalam persaingan. Apalagi banyak masalah klasik sektor industri yang tak kunjung menemukan solusi.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memaparkan data perbandingan yang menunjukkan Vietnam berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada 2023, pertumbuhannya kedua negara hampir setara. Vietnam di angka 5,05 persen dan Indonesia 5,03 persen. Namun, Vietnam diproyeksikan melesat jauh di tahun-tahun berikutnya.

Setahun kemudian, Vietnam melompat di 7,09 persen, sedangkan Indonesia berada di 5,11 persen. "Lalu pada 2025, Vietnam di 7,39 persen, kita di 5,12 persen. Kelahiran kan akhirnya ada ketertinggalan," ungkap legislator yang karib disapa Nunik itu.

Meski Indonesia masih unggul dibandingkan beberapa negara lain, menurutnya, ketertinggalan dari Vietnam dalam hal industri dan ekonomi secara umum sudah sangat nyata. Dia ingin mengetahui hal apa yang bisa diaspirasikan DPR, lalu Pemerintah bisa memperjuangkan dan eksekusi bersama.

"Sehingga nantinya kebijakan yang dikeluarkan memang untuk kebutuhan industri," katanya.

Lebih lanjut, dia meminta Pemerintah lebih serius melindungi dan menghidupkan industri nasional, khususnya di sektor strategis, saat meng-

hadapi situasi semacam ini. Pihaknya akan terus mendorong Pemerintah mengambil langkah-langkah strategis guna menghadapi situasi ini.

"Pemerintah perlu segera menyiapkan langkah mitigasi, karena melindungi industri dalam negeri berarti juga melindungi tenaga kerjaku," tegasnya.

Sementara, anggota Komisi VII DPR Novita Hardini meminta agar ego sektoral dihapuskan, khususnya dalam sektor petrokimia. Pasalnya, industri petrokimia bersama dengan logam maupun baja sering dijadikan sebagai *benchmark* kemajuan suatu negara karena merupakan basis bagi industri manufaktur.

Dia bilang, industri petrokimia merupakan salah satu pilar industri nasional yang perlu dikembangkan. "Caranya dengan penguatan struktur hulu hingga produk hilir, agar bisa memenuhi kebutuhan domestik berupa pangan, sandang, dan papan," jelas Novita.

Ego sektoral antarkementerian, lanjutnya, jadi penghambat integrasi kebijakan seperti persoalan pasokan gas. Jika Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait migas tidak satu irama, ujung-ujungnya yang dirugikan masyarakat.

"Industri tidak jalan, pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat, daya beli menurun, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ikut terdampak," tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Novita mendorong Pemerintah untuk segera menyatukan visi dalam memperkuat hilirisasi industri dan mengedepankan kepentingan rakyat. Hilirisasi harus benar-benar matang dengan dukungan insentif pemerintah, termasuk pajak bagi industri petrokimia yang bertransformasi ke industri hijau. ■ PVB